



IDN/ANTARA

RELAWAN COVID-19 UPACARA PERINGATAN HUT RI

Sejumlah relawan pemakaman jenazah protokol COVID-19 dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) melakukan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI di Pemakaman Pagu Indah Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (15/8). Para relawan pemakaman jenazah tersebut terdiri dari unsur Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Puskesmas.

KASIHAN TERHADAP PEDAGANG

Wali Kota Arief Ingin Mal di Tangerang Beroperasi Lagi

Menurut Arief, mal tempat berjualan pedagang-pedagang padat karya seharusnya sudah diizinkan beroperasi untuk menjaga perputaran ekonomi di Kota Tangerang selaku salah satu kota penyangga Jakarta.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah membahas soal operasional mal di kota tersebut bersama dengan pimpinan daerah se-Tangerang Raya.

Mal di Kota Tangerang diketahui masih belum diizinkan beroperasi selama perpanjangan pemberlakuan

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 11-16 Agustus 2021.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah berujar, pembahasan itu dilakukan karena melihat mal di DKI Jakarta yang sudah diizinkan beroperasi.

Menurut Arief, mal tempat berjualan pedagang-pedagang padat karya seharusnya sudah

diizinkan beroperasi untuk menjaga perputaran ekonomi di Kota Tangerang selaku salah satu kota penyangga Jakarta.

"Karena (mal) di Jakarta dibuka, apakah kita boleh? Karena kasihan juga mereka yang di pertokoan terutama. Itu kan padat karya juga," kata Arief melalui sambungan telepon, Minggu (15/8).

"Kita memang mengambil kebijakan rem dan gas. Memang kebijakannya lagi kendur, harusnya sudah rata-rata sedikit ngegas supaya ekonomi terjaga," sambungnya.

Arief menyebutkan beberapa contoh skema yang dapat diterapkan jika mal di Kota Tangerang diizinkan beroperasi. Skema itu di antaranya para pedagang diizinkan beroperasi

dengan catatan hanya melayani pesanan daring atau para pedagang diizinkan beroperasi dengan maksimal pengunjung 20 persen di satu toko.

Meski demikian, Pemkot menghargai keputusan pemerintah pusat yang belum mengizinkan operasional mal di Kota Tangerang. Arief menyatakan, pihaknya juga harus berhati-hati jika hendak membuka kembali operasional mal di Kota Tangerang.

Dia menghindari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 saat mal mulai diizinkan beroperasi. "Pak Menko Maritim (Luhut Panjaitan) penginjilnya pelan-pelan, karena banyak negara lain habis lockdown dibuka, kasusnya banyak lagi. Kita enggak mau sehingga kita harus

hati-hati," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, pembukaan kembali mal di DKI Jakarta dan tiga wilayah lainnya mengikuti pelonggaran dalam perpanjangan PPKM level 4 yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021. Dalam aturan itu, mal dibolehkan untuk buka dengan maksimal jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas normal. Jam operasional juga dibatasi hanya dari pukul 10.00-20.00 WIB. Selain itu, pengunjung mal harus sudah divaksinasi dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Anak di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun untuk sementara dilarang masuk mal. ● pp

OMBUDSMAN MINTA APARAT PROFESIONAL

Penyelidikan Pungli Bansos di Kota Tangerang Mandek

TANGERANG (IM)- Ombudsman Perwakilan Banten meminta aparat penegak hukum di Kota Tangerang segera menanganai kasus praktik pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) yang mencuat di sana. Praktik pungli di Kota Tangerang mencuat saat Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) pada 28 Juli 2021 di Karang Tengah, Kota Tangerang.

Sejak 29 Juli 2021 hingga saat ini, kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang masih melakukan penyelidikan dan belum menemukan tersangka. Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Dedy Irsan meminta polisi dan kejaksaan menangani kasus itu secara profesional. "Kita berharap aparat penegak hukum, khususnya di Kota Tangerang, dapat menanganainya (kasus pungli bansos) secara profesional sesuai hukum yang berlaku," papar dia dalam

keterangannya, Minggu (15/8).

Ombudsman hingga saat ini tengah menunggu perkembangan lebih lanjut soal penyelidikan kasus pungli bansos itu. Dia menegaskan, jika penanganan kasus pungli bansos itu tak kunjung memiliki perkembangan, pihaknya bakal meminta penjelasan kepada kepolisian dan kejaksaan. "Kita tunggu perkembangannya. Kalau molor berlarut-larut, kita akan suruti aparat penegak hukum yang menanganai kasus tersebut untuk meminta penjelasannya," katanya.

Berdasarkan catatan, perkembangan terakhir dari penyelidikan kasus yang dilakukan Kejari Kota Tangerang, mereka telah menemukan adanya indikasi pungli bansos di wilayah hukumnya. Kasi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Bayu Probo Sutopo menyatakan, indikasi pungli itu ditemukan setelah pihaknya memeriksa sekitar 10 saksi.

Namun, penyelidikan yang dilakukan kejaksaan tidak terfokus kepada pungli bansos PKH di Karang Tengah saja, melainkan pungli bansos jenis lainnya

di Kota Tangerang. Pihaknya juga sudah memiliki gambaran soal besaran kerugian negara atas pungli bansos di Kota Tangerang. "Gambaran (kerugian) sudah ada, tapi belum bisa kami sampaikan, nanti akan mempersulit penyelidikan," ujar Bayu.

Selain kejaksaan, kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan atas kasus serupa. Per 3 Agustus 2021, kepolisian setidaknya telah memeriksa 12 saksi terkait praktik pungli PKH di Karang Tengah. Rinciannya, tiga orang dipanggil pada 3 Agustus, dua orang pada 2 Agustus, dua orang pada 31 Juli, dan lima orang pada 29 Juli 2021.

Kepolisian belum dapat mengungkapkan penyelidikan mereka hingga saat ini. Adapun praktik pungli itu terungkap saat Risma mengunjungi warga Karang Tengah yang berinisial S pada 28 Juli 2021. Kepada Risma, S mengaku ditanki pungli oleh pendamping PKH bernama Maryati sebesar Rp 50.000. S juga dancam, jika membocorkan nama Maryati, maka dia tak akan mendapatkan bantuan lagi. ● pp

Realisasi Rendah, Pemkot Tangsel Turunkan Target Vaksinasi

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak yakin capaian vaksinasi bagi 1.073.266 warganya dapat tercapai 100 persen hingga akhir Agustus 2021. Hal ini lantaran sejumlah kendala dalam mengejar target vaksinasi.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengemukakan, saat ini realisasi vaksinasi dosis pertama bagi warga Tangsel baru mencapai 40 persen sedangkan untuk dosis dua baru 20 persen. "Kalau melihat kondisi kayak begini agak susah ya," ungkap Benyamin Davnie saat dikonfirmasi, Sabtu (14/8).

Benyamin mengemukakan, masih rendahnya realisasi vaksinasi di Tangsel dipengaruhi beberapa hal. Seperti keterbatasan stok

vaksin sampai tenaga vaksinator yang kelelahan untuk bisa mengejar target vaksinasi yang ingin dicapai Pemerintah.

"Jumlah vaksinasi kan juga tidak bisa didrop sekaligus dari Dinkes Banten. Yang kedua teknis pelaksanaannya, waktu itu di kelurahan, setiap kelurahan saya bebaskan 5.000 satu hari, itu kelelahan di tingkat medisnya yang enggak ketolongan," ucap Benyamin.

Dengan realita tersebut, Pemkot Tangsel kemudian menurunkan target capaian vaksinasi yang ingin dicapai 100 persen di akhir Agustus 2021 ini menjadi 60 persen.

"(60 persen) sampai akhir Agustus lah. Insha Allah kecapaian. Saya yakin tercapai," kata Benyamin. ● pp

KORUPSI DANA BOS RP280 JUTA

Mantan Kepala UPT Dindik Pandeglang Dijebloskan ke Penjara

PANDEGLANG (IM)- Mantan Kepala UPT Dindik Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten, AWS, kini harus merasakan dinginya tidur beralaskan tikar di balik jeruji besi. Hal itu karena, AWS saat ini statusnya sudah resmi menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Pandeglang.

Kasus yang dilakukan AWS itu sendiri adalah korupsi penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2018-2019 yang merugikan negara sebesar Rp280 juta. AWS diketahui dengan luasnya memanfaatkan jabatannya sebagai kepala UPT untuk menyikat dana BOS itu.

"Betul, pemeriksaannya sudah lengkap. Yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Pandeglang," kata Kasi Pidus Kejari Pandeglang, Kunto Trihatmojo saat dikonfirmasi, Minggu (15/8).

Ia menjelaskan, pihaknya sendiri secara resmi telah memberikan status kepada

AWS sebagai tersangka pada bulan Maret 2021 lalu.

Ia diduga melakukan korupsi pengadaan buku untuk kegiatan mengajar (KBM) terhadap 22 Sekolah Dasar di Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten.

Akibat ulahnya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) mencatat adanya kerugian negara hingga Rp280 juta. "Saat ini berkasnya sudah lengkap dan sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor, dan mungkin dalam jangka waktu dekat akan segera disidangkan," jelasnya.

Kejari Pandeglang memastikan terus memburu tersangka lain yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ASW diancam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. ● pra

Pemkab Lebak Siapkan Lahan 30 Ha untuk Hunian Tetap Korban Bencana

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menyiapkan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban bencana alam tahun 2020.

"Kami berharap secepatnya warga Cigobang Lebak Gedong yang terdampak bencana alam dapat menempati hunian tetap (huntap)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Budi Santoso di Lebak, Sabtu kemarin.

Pemerintah Kabupaten Lebak tengah menyiapkan lahan seluas 30 hektare di lahan milik kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Lahan milik TNGHS itu, kata dia, kini tengah diproses melalui pemerintah pusat, kementerian hingga presiden.

Apabila, lahan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat maka akan dialokasikan untuk pembangunan huntap,

pasar dan tempat sarana ibadah juga sarana fasilitas sosial.

"Kami berharap lahan 30 hektare yang diperjuangkan itu dapat direalisasikan untuk warga korban bencana alam, " katanya menjelaskan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Feby Rizki Pratama mengatakan saat ini jumlah warga korban bencana alam tahun 2020 yang kehilangan tempat kediaman di Cigobang Lebak Gedong tercatat 113 kepala keluarga.

Mereka warga korban bencana alam menempati hunian sementara di Kampung Cigobang dan perlu segera direalisasikan pembangunan huntap agar hidup layak dan sehat.

"Kami hari ini menyalurkan bantuan beras sebanyak 565 kilogram terpal dan tikar dari Bupati Iti Octavia," katanya. ● pra

Kapolres Lebak: Masyarakat yang Divaksin Memperoleh Beras

LEBAK (IM)- Kepala Kepolisian Resor Lebak, AKBP Teddy Rayendra mengatakan masyarakat yang divaksin memperoleh bantuan beras lima kilogram untuk mendukung ketersediaan pangan mereka di tengah pandemi Covid-19. "Kami melaksanakan gebyar vaksinasi di seluruh Polsek guna kemudahan melayani masyarakat," kata dia di Lebak, Banten, Sabtu (14/8).

Polres Lebak bekerja keras untuk melakukan percepatan vaksinasi agar pandemi Covid-19 segera berakhir di Kabupaten Lebak. Masyarakat yang akan divaksinasi bisa mendatangi seluruh Polsek di Kabupaten Lebak.

Ia mengatakan vaksinasi secara gratis, sedangkan warga cukup membawa identitas, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengatakan warga yang telah menjalani vaksinasi mendapat bantuan beras untuk meringankan beban ekonomi mereka di tengah pandemi Covid-19.

Selama ini, kata dia, pelaksa-

naan program vaksinasi di seluruh polsek berjalan lancar. "Kami optimistis menargetkan 5.000 vaksinasi bisa terealisasi," katanya.

Ia mengapresiasi minat warga untuk divaksin yang cukup tinggi hingga terlihat terjadi antrean. Namun, mereka tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan memakai masker serta menjaga jarak dan mencuci tangan.

Kepolisian, katanya, tentu berkomitmen untuk sukseskan program vaksinasi nasional agar Indonesia terbebas pandemi. "Kami mengajak warga untuk mengikuti gebyar vaksinasi untuk kekuatan 'herd immunity' (kekebalan kelompok) sehingga tidak terpapar virus corona," katanya.

Amin (40), warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku bahagia setelah menjalani vaksinasi dan sekaligus mendapatkan beras lima kilogram. "Kami divaksin di Polsek Rangkasbitung gratis juga dapat bantuan pangan," katanya. ● pra



IDN/ANTARA

SEMBAHYANG KUBUR DI RUMAH

Warga Tionghoa membakar uang kertas arwah saat melaksanakan sembahyang kubur di kediamannya di Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (15/8). Sembahyang kubur untuk menghormati leluhur dan keluarga yang telah meninggal tersebut digelar di rumah masing-masing, mengikuti imbauan Gubernur Kalbar kepada masyarakat Tionghoa untuk tidak melaksanakan tradisi itu di pemakaman guna mencegah kerumunan di masa pandemi COVID-19.

SEGENAP JAJARAN DIREKSI BESERTA STAF PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 th

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

EKA BHINEKAS
Direktur Operasional

HASANUDIN TAHIR
Direktur Utama

EFIE PANCAWATI
Direktur Umum